

KEKERASAN STRUKTURAL DALAM PROSES PERCEPATAN KOPERASI MERAH PUTIH

Yuliana Sandra Frastiwi

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
Email Korespondensi: sandrayuliana811@gmail.com

Abstrak: Dengan banyaknya penelitian dan artikel tentang koperasi merah putih yang sebagian besar fokus terhadap sisi baik dan positif atas program tersebut. Tulisan ini akan mengkritisi tentang tidak dilibatkannya masyarakat dan pemerintah desa dalam proses formulasi kebijakan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk kekerasan struktural. Detailnya, tulisan ini akan melakukan analisa tipologi kekerasan struktural yang memiliki enam karakteristik 1) Berupaya mendapatkan legitimasi dengan mempengaruhi sisi psikologis, 2) sanksi dengan menggunakan metode stick and carrot, 3) Desa sebagai objek yang tersakiti, 4) pemusatan kekuasaan, perampasan kedaulatan desa, 5) kekerasan struktur yang lahir secara sengaja atau tidak disengaja?, 6) kekerasan laten yang melumpuhkan kemandirian desa.

Kata kunci; kekerasan struktural, koperasi merah putih, ketimpangan

Abstract: Research and article that discuss 'koperasi merah putih' mostly focused on the positive side and the good things that will people achieve by program. This article will critically examine how government policy to accelerate the formation of "Koperasi Merah Putih" neglected his people need and interest that lived in a village as a structural violence. To explore specifically about structural violence that happen on "koperasi merah putih", this article will discuss 1) seeking legitimation through psychological process, 2) stick and carrot as a sanction, 3) hurting village as an object of program, 4) centralization of power means seizure village sovereignty, 5) intended or unintended structural violence?, 6) latent violence by disabling village autonomy on the process

Keywords: kekerasan struktural, koperasi merah putih, ketimpangan

Article History :

Received 05-08-2025; Revised 27-08-2025; Accepted 04-09-2025

PENDAHULUAN

Ditengah masifnya pemberitaan positif dan janji pemerintah bahwa Koperasi Merah Putih akan mengalami kesuksesan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Banyak pakar menyoroti kebijakan ini terlalu terburu-buru dan tidak direncanakan dengan matang. Salah satu hal fundamental yang diabaikan oleh pemerintah adalah keterlibatan msyarakat dan pemerintah desa dalam proses perumusan kebijakan tersebut. sebagai masyarakat dan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan kebijakan ini dilapangan, partisipasi mereka merupakan sebuah keharusan. Namun, nyatanya masyarakat dan pemerintah desa masih bingung dan banyak yang tidak mengetahui akan program pemerintah yang dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan desa. Sayangnya, pemerintah hanya fokus terhadap percepatan pembentukan koperasi merah putih tanpa memberikan penjelasan yang jelas terkait mekanisme lapangan dan juga potensi-potensi kesulitan yang nanti akan dialami.

Sejauh ini, problematisasi tentang proses percepatan pembentukan koperasi merah putih masih minim dilakukan. Sebagian besar artikel dan penelitian tentang percepatan koperasi merah putih

menyajikan data yang terlalu optimis (Nuraisyah 2025; Setiawan 2025; Yaputra 2025) dan positif (Haris 2025; Kusumasari 2025), positif namun dengan catatan (Arzewiniga and Zulkarnain 2025) tentang program tersebut. Meskipun banyak juga penelitian dan artikel yang mengkritisi (Irfani 2025; Pratama 2025; Saleh 2025) dan memperdebatkannya (Amaliyah 2025; Dirgantara, and Ramadhan 2025; Jelita 2025; Mediana 2025; Mediatama 2025). Dari beberapa artikel dan penelitian yang telah disebutkan di atas masih belum ada penelitian yang melihat program percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih dengan menggunakan perspektif strukturalisme. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menawarkan cara pandang lain dalam menganalisa fenomena tersebut dengan

Penelitian ini hanya akan berfokus pada proses percepatan pembentukan koperasi merah putih sebagai bentuk pengabaian akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Sumber data yang akan digunakan adalah sejak munculnya koperasi merah putih pada bulan Maret 2025 hingga diresmikannya koperasi merah putih pada tanggal 21 Juli 2025.

Strukturalisme

Karena berangkat dari institusi dan struktur, maka pemaknaan terhadap struktur menjadi penting untuk dibahas. Menurut Landman, strukturalis tertarik pada isu-isu sosial, politik, dan jaringan ekonomi yang terjalin antar dan antara individu. Sementara struktur termanifestasi baik di dalam maupun luar negeri. Berbeda dari rasionalisme, strukturalisme memandang bahwa individu dan negara tidak mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasionalitas. Karena, aktor individu bukanlah agen yang bebas dan memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan. Individu terikat pada struktur hubungan yang akhirnya membentuk identitas, kepentingan dan interaksinya (Kathleen 2007).

Kekerasan Struktural

Berbicara tentang kekerasan struktural adalah Galtung yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan dan bapak studi Perdamaian. Dalam tulisannya *Violence, Peace and Peace Research* Galtung memberikan definisi bahwa kekerasan struktural terdiri dari dua hal, aktual dan potensial. "*Violence is here defined as the cause of difference between the potential and the actual*, kekerasan struktural adalah suatu hal yang memberikan jarak atau menghalangi potensi dan aktual. Contoh; jika seseorang meninggal karena TBC pada abad ke 18 akan sulit untuk menyatakannya sebagai bentuk kekerasan, karena mungkin hal tersebut tidak dapat dihindarkan¹. Namun jika dia meninggal saat ini, dengan kenyataan fasilitas, ilmu dan sumberdaya kesehatan yang sudah maju dan modern, Galtung menyatakan bahwa ada kekerasan dalam kondisi tersebut (Galtung 1969). Dengan kata lain, ketika potensi untuk menghindari kejadian tersebut ada namun tidak dapat dihindari, disitulah kekerasan hadir.

Contoh lainnya adalah harapan hidup yang hanya sampai umur 30 tahun pada masa neolitikum, bukanlah sebuah ekspresi kekerasan. Namun, angka harapan hidup yang sama² jika terjadi pada saat ini akan dipandang sebagai sebuah kekerasan³. Mengapamenganggap ada kekerasan disana?, kondisi saat ini memungkinkan untuk manusia memiliki harapan hidup lebih tinggi, sehingga ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan modern dimana kesehatan, pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan lebih baik, seharusnya harapan hidup menjadi lebih tinggi. Sehingga, dengan terpenuhinya kualitas

¹ Dengan pertimbangan pada masa tersebut belum ditemukan alat ataupun obat yang mampu menyembuhkan penyakit TBC, sehingga kematian karena penyakit TBC pada masa tersebut bisa dipahami sebagai hal yang lumrah.

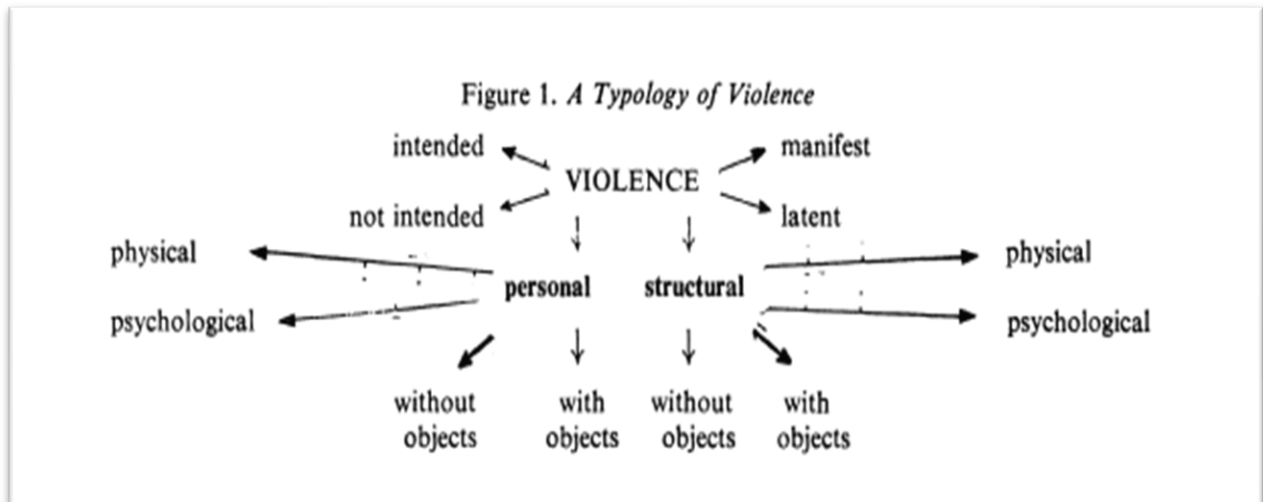
² karena peperangan, atau ketidakadilan sosial, ataupun keduanya.

³ Hal ini bisa terjadi karena sebuah potensi hanya akan terealisasi dengan bantuan sumberdaya yang ada. Namun, ketika sumberdaya yang ada dimonopoli oleh kelompok, kelas tertentu atau digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Yang terjadi kemudian adalah kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi tersebut menjadi jauh lebih rendah dan sulit. Sehingga kekerasan terjadi di level sistem (Galtung 1969).

penunjang hidup manusia yang lebih baik, menjadi sebuah pertanyaan jika harapan hidup masih setara dengan masa Neolitikum. Terdapat potensi kekerasan struktural pada kondisi tersebut.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah tipologi kekerasan berdasarkan pengaruh menurut Galtung.

Sumber ; (Galtung 1969)



Gambar 1. A Typology of Violence

Tipologi kekerasan menurut gambar diatas berdasarkan cara mempengaruhi terdiri dari ; **pertama**, hal yang membedakan antara kekerasan fisik dan psikologis. Dimana kekerasan yang terbentuk melalui struktur adalah bentuk kekerasan yang menyakiti psikologis yang seringkali membuatnya tidak tampak sebagai sebuah kekerasan. **Kedua**, upaya untuk mempengaruhi dengan menggunakan pendekatan positif dan negatif. Sistem selalu menerapkan hadiah dan hukuman dalam pendekatannya. **Ketiga**, pendekatan objek, tentang ada atau tidaknya objek yang disakiti. Jika menyakiti secara fisik akan terlihat melalui luka ataupun lebam yang tampak pada fisik. Menyakiti secara psikologis tidak memperlihatkan objek yang jelas, lalu apakah dengan demikian tidak termasuk dalam bentuk kekerasan? Ketidakjujuran tidak serta merta menjadi sebuah kejujuran jika tidak ada yang mempercayainya. Berdasarkan pandangan ini, maka dalam kondisi tertentu kebohongan dapat dikatakan sebagai kekerasan(Galtung 1969). **Keempat**, ada atau tidaknya aktor yang bertindak. Bertindak dalam hal ini bermakna aktor dalam kekerasan struktural memiliki kemungkinan untuk tidak secara langsung menyakiti orang lain. Namun, kekerasan yang dibangun melalui struktur akan melahirkan kekuasaan yang timpang dengan konsekuensi kesempatan yang tidak sama. **Kelima**, apakah kekerasan dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja. **Keenam**, kekerasan yang termanifestasi dan laten (Galtung 1969). Karena kekerasan struktural adalah segala hal yang menghalangi perkembangan pribadi dan yang dibangun melalui struktur, sehingga segala bentuk tindakan yang tidak secara langsung mengahalanginya merupakan kekerasan (Parsons 2007). Dengan kata lain, konsep kekerasan struktural merupakan payung dari ketimpangan inequality, ketidakadilan injustice, eksploitasi, penetrasi, fragmentasi dan marginalisasi.

Dimana saja orang disakiti, dibunuh dengan kemiskinan, oleh ketidakadilan sosial, politik, institusi ekonomi, sistem atau struktur maka kita berbicara tentang kekerasan struktural(Gernot and Alcock 1976). Kekerasan tidak hanya sebatas fisik atau biologis. Kekerasan psikologis yang mungkin tidak menyisakan luka yang terlihat kasat mata layaknya fisik. Dalam kekerasan fisik, orang disakiti sampai pada keadaan meninggal. Sementara kekerasan psikis jarang terlihat, namun nyata, seperti akses yang sulit terhadap transportasi umum karena akses dimonopoli oleh kelompok tertentu, menunjukkan bahwa keadilan dalam hal akses transportasi hanya menguntungkan kelompok tertentu(Galtung 1969).

Kekerasan struktural, merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dibangun melalui struktur yang melahirkan kondisi kekuasaan yang tidak setara dengan konsekuensi kesempatan hidup yang timpang (Winter 2012). Ditandai dengan sumberdaya yang tidak didistribusikan atau meskipun didistribusikan hanya mereka yang memiliki kuasa yang mampu dan menentukan akan didistribusikan kemana sumberdaya tersebut. Kekerasan struktural seringkali tidak terlihat, biasanya terjadi dalam bentuk tekanan dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan struktur politik yang beroperasi secara tidak terlihat. Hal tersebut yang akhirnya membentuk ketimpangan, marginalisasi dan perampasan secara tidak langsung melalui sistem (Ragandang 2024). Kekerasan struktural hanya dapat dibangun melalui struktur yang stabil, hal ini yang membedakan dengan kekerasan personal yang biasanya terlihat jelas dan dapat dihitung berdasarkan kerusakan (akibat konflik kelompok dan peperangan) seringkali terjadi pada kondisi yang fluktuatif (Galtung 1969).

METODE PENELITIAN

Bertujuan untuk melakukan pendalaman dan pemahaman akan permasalahan yang sedang terjadi, pendekatan kualitatif menjadi pilihan untuk melakukan analisa. Karena tulisan ini berasumsi bahwa percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk kekerasan struktural, hal pertama yang akan dibahas adalah pemaparan singkat tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan struktural. Selanjutnya pembahasan kasus berdasarkan tipologi kekerasan struktural sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian pembahasan, data yang telah didapatkan dari fakta lapangan, akan dipetakan sesuai dengan tipologi kekerasan struktural, dengan menambahkan pemaknaan pada masing-masing bagian. Data yang dimaksud dalam tulisan ini adalah data sekunder yang didapat melalui kajian akademik, perdebatan pakar, dan website resmi pemerintah yang kemudian dilakukan analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kekerasan struktural dalam proses percepatan pembangunan koperasi merah putih. Yaitu dengan mempertanyakan “bagaimana kekerasan struktural terjadi dalam proses pelaksanaan program percepatan Pembangunan koperasi merah putih di Indonesia?” 80.000 koperasi desa adalah jumlah yang teramat besar dengan persiapan hanya kurang dari 4 bulan untuk diresmikan. (ini angka yang tidak masuk akal dan jelas musyawarah desa hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas. Slogan yang selalu dikatakan untuk membangun desa perlu dipertanyakan, atas dasar pertimbangan apakah Pembangunan desa dilakukan jika tidak melibatkan masyarakat desa dalam proses formulasi kebijakan bagi desa.

Karakteristik kekerasan struktural dari segi metode memiliki karakteristik mempengaruhi psikologis. Ketika kekerasan secara langsung menysasar tubuh, kekerasan struktural menjadikan psikologis sebagai objek kekerasan, *‘the basic distinction between violence that works on body and violence that works on soul; whether the latter would include lies, brainwashing, indoctrination of various kinds, threats, etc. that serve to decrease mental potentialities’* (Galtung 1969). Hal-hal yang biasanya dilakukan dalam kekerasan struktural adalah dengan menampilkan kebohongan, pola mencuci otak, indoktrinasi, ancaman, dst. Segala macam upaya yang untuk melemahkan potensi mereka yang dipengaruhi (Galtung 1969).

Untuk Kepentingan Rakyat

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang

berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu(Kementerian Koperasi Republik Indonesia 2025)

Menko Pangan Zulkifli Hasan meyakinkan masyarakat bahwa dengan keberadaan koperasi merah putih, kebutuhan masyarakat akan mudah terpenuhi. Menguatkan ketahanan pangan, memotong rantai pasok dan mempermudah penyaluran bantuan dari pemerintah(Putih 2025a). Pemerintah pun memberikan kemudahan⁴ dalam mengurus legalitas Koperasi Merah Putih(Putih 2025b).

Dukungan positif tidak hanya dari pernyataan pemerintah, banyak media dan penelitian yang mendukung program pemerintah ini. Musadad dalam penelitiannya menyoroti bahwa koperasi merah putih dengan basis digital diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan(Musadad et al. 2025). Peran BPD yang digambarkan penting dalam pembentukan koperasi merah putih(Subakti and Partiah 2025)

Sementara Farid dengan menggunakan analisis wacana menemukan bahwa BUMDes dan Koperasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan⁵ pendapatan masyarakat desa(Farid 2025). Penelitian, artikel dan pernyataan pemerintah baik melalui statement, sosialisasi, konferensi pers dan wawancara diatas memiliki peran penggambaran koperasi merah putih dengan narasi positif dan keuntungan yang besar(Nasional 2025) bagi masyarakat desa. Dengan narasi positif yang selalu disampaikan tersebut, pemerintah berupaya keras untuk meyakinkan publik dan masyarakat.

Permasalahan dengan percepatan

Meskipun desa merupakan level terendah dalam pemerintahan, tidak serta merta pemerintah desa memiliki kepentingan yang sejalan dengan pemerintah pusat. Penggunaan kata percepatan dalam pembentukan koperasi Desa/ kelurahan yang tertuang dalam inpres Nomor 9 Tahun 2025(bpk 2025) membuktikan bahwa kebijakan ini memang harus dilakukan oleh pemerintah desa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas mereka.

Dalam acara dengar pendapat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri menyatakan bahwa dalam proses sosialisasi, pemerintah selalu menekankan pentingnya dialog. sehingga setiap judul sosialisasi selalu menggunakan kata Percepatan dan Dialog(Diskusi Tematik “Problematika Koperasi Desa Merah Putih 2025). Memang kata-kata dialog disematkan dalam judul sosialisasi, namun percepatan tetap berada di awal kalimat. Lalu apa arti keberadaan dialog, jika yang diprioritaskan adalah percepatan pembentukan koperasi merah putih?. Dialog hanya sebatas formalitas dan semu, tidak lebih hanya sebatas sosialisasi program kerja. banyak pertanyaan dari perangkat desa yang tidak terjawab dengan baik oleh narasumber, terutama yang berkaitan dengan teknis lapangan.

Dialog hanya menjadi kata pemanis bagi proses percepatan. Jika memang terjadi keseluruhan peserta sosialisasi. Faktanya, setuju atau tidak dengan program ini, pembentukan koperasi merah putih tetap berjalan yang hingga saat tulisan ini ditulis, telah terealisasikan sebanyak 81.147 desa dari total 83.762 desa yang ada di Indonesia (Kementerian Koperasi Republik Indonesia 2025). Sebuah pencapaian luar biasa mengingat program ini telah terealisasikan dalam waktu kurang lebih empat bulan.

⁴ Kementerian Koperasi dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi, padahal sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian Lembaga bisa mencapai 7 juta. Menteri pangan menyatakan bahwa hal itu terjadi karena koperasi merah putih memiliki privilege karena menyalurkan komoditas yang mendapatkan subsidi dari Negara. Untuk selengkapnya lihat (Putih 2025b)

⁵ Meskipun dalam tulisannya, Farid tidak memberikan penjelasan yang konsisten. Apakah yang dijadikan objek penelitian BUMDes dan koperasi?. Meskipun dalam judul tertera Koperasi Merah Putih, namun dalam simpulan penelitian yang dibahas adalah koperasi. lihat (Farid 2025)

Masyarakat desa hanya tahu bahwa ini adalah program yang diharuskan oleh pemerintah tanpa memiliki kesempatan untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Dalam acara dengar pendapat menteri Desa dan daerah tertingga Yandri bahkan mengatakan bahwa hampir semua desa antusias dengan adanya koperasi merah putih, hanya ada satu atau dua desa saja yang mengkritisi koperasi merah putih, pernyataan Menteri tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Celios yang menyatakan banyaknya kekhawatiran oleh perangkat desa tentang program ini.

Melalui penelitian yang dilakukannya ada enam hal yang digarisbawahi; pertama, sebanyak 76% perangkat desa menolak Kopdes Merah Putih dibiayai dengan pinjaman Bank dengan Dana Desa sebagai sumber pembayaran cicilan (Mediatama 2025). Kedua, 6 dari 10 Desa mempertanyakan otonomi yang jika dana desa digunakan untuk membayarkan cicilan pinjaman memiliki konsekuensi bahwa pemerintah desa tidak dapat menggunakan Dana Desa bagi kepentingan masyarakat desa. Ketiga, 65 % perangkat desa menilai bahwa program ini berpotensi besar untuk terjadi korupsi dalam pelaksanaannya. Keempat, kepentingan politik menjadi alasan yang kuat dari berdirinya Koperasi Merah Putih tersebut. Kelima, perangkat desa juga memiliki kekhawatiran akan konflik dan pergeseran sosial di desa. Keenam, keberadaan Koperasi Merah Putih yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat BUMDes (Askar et al. 2025).

positivisme yang berlebihan

Euforia dan mimpi-mimpi akan kesuksesan koperasi merah putih terlalu berlebihan. Layaknya manusia jika terlalu banyak mengonsumsi gula akan menyisakan ruang bagi penyakit gula yang berbahaya. Mungkin analogi itu cukup mampu menggambarkan upaya mempengaruhi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberitaan, penjelasan presiden beserta jajarannya tentang betapa indah, bahagia dan sejahteranya desa setelah terbentuknya koperasi merah putih, berupaya dengan keras mengaburkan rasionalitas publik tentang betapa membingungkan konsep koperasi merah putih yang terlalu idealis ini diterapkan dalam realita kehidupan yang ada di desa.

80.000 koperasi desa adalah jumlah yang teramat besar dengan persiapan hanya kurang dari 4 bulan untuk diresmikan. (ini angka yang tidak masuk akal dan jelas musyawarah desa hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas.. Fakta lapangan yang menunjukkan keraguan (Ayuningrum 2025) dan ketakutan untuk menjalankan program pemerintah ini tidak mendapatkan sambutan yang serius⁶, yang terbukti dengan tetap berjalannya program tersebut terlepas dengan permasalahan pelaksanaan yang masih kabur, seperti yang dikatakan oleh menteri desa “kita bentuk saja terlebih dahulu, detail teknis lapangan nanti menyusul” (Yunus 2025). Masyarakat diharuskan untuk percaya, tidak ragu dan berani terhadap rencana besar koperasi merah putih, karena ketika ketika terjadi keraguan, ketakutan dan kecurigaan terhadap program ini (Putih 2025d). Maka mereka adalah musuh koperasi, karena koperasi ini adalah program pemerintah, bisa dikatakan musuh koperasi adalah musuh pemerintah.

Sanksi dengan menggunakan metode stick and carrot

Berupaya untuk mempengaruhi dengan menggunakan pendekatan positif ataupun negatif. dengan memberikan hukuman jika apa yang dilakukan oleh mereka yang dipengaruhi *influencee* ini salah menurut pemberi pengaruh *influencer*, dan memberikan hadiah jika apa yang dilakukan *influencee* benar menurut *influencer* (Galtung 1969). Meskipun tidak menimbulkan luka secara kasat mata, tetap saja ini adalah bentuk kekerasan. Karena, orang tersebut diupayakan untuk tidak menyadari potensi yang dimilikinya.

⁶ Keseriusan yang dimaksud baik dalam menanggapi kritik masyarakat dan pakar. Pemerintah seringkali tidak memasukkan pertimbangan masyarakat yang mengkritisi, dengan cara selalu meyakinkan dengan narasi bahwa program ini bagus, keuntungan yang luar biasa, potensi membuka lapangan pekerjaan, desa akan semakin Makmur dst.

Percepatan untuk segera membentuk koperasi merah putih memiliki arti pemerintah secara halus mengharuskan⁷ desa untuk melakukannya. Meskipun desa merupakan level terendah dalam pemerintahan, tidak serta merta pemerintah desa memiliki kepentingan yang sejalan dengan pemerintah pusat. Penggunaan kata percepatan dalam pembentukan koperasi Desa/ kelurahan yang tertuang dalam inpres Nomor 9 Tahun 2025(bpk 2025) membuktikan bahwa kebijakan ini memang harus dilakukan oleh pemerintah desa, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas mereka. Slogan yang selalu dikatakan untuk membangun desa perlu dipertanyakan, atas dasar pertimbangan apakah Pembangunan desa dilakukan jika tidak melibatkan masyarakat desa sebagai

Beberapa kajian dan pakar meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang dan mengundur program ini. Namun, pemerintah tetap memberikan narasi-narasi positif dalam setiap kesempatan dan sosialisasi yang dilakukan. Dengan tegas menteri koperasi Budi Ari menyampaikan bahwa, “Musuhnya Kopdes/Kel Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme bukan keragu-raguan,”(Putih 2025d). seakan tidak memiliki keraguan dan memastikan bahwa program ambisius pemerintah ini pasti berhasil. Dengan pernyataan tersebut, secara tidak langsung pemerintah menganggap bahwa mereka yang takut, curiga dan ragu adalah musuh pemerintah. Ini adalah sebuah kata yang berbahaya, karena memiliki konsekuensi untuk melemahkan dan mendiskreditkan mereka yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Selain masyarakat desa yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, mereka juga dilarang untuk meragukan, takut dan curiga atas program tersebut.

"Kalau gagal kali ini, maka tidak akan ada koperasi lagi. Tidak akan ada lagi," tegas Zulhas pada acara pada acara Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hari Rabu, 25 Juni 2025 di Mandiri University(Anggia 2025). Pernyataan Kementerian pangan memberikan harapan yang besar bahwa desa harus berhasil mensukseskan program pemerintah tersebut. Desa terhimpit dengan tekanan yang datang dari pemerintah untuk segera memebentuk dan mensukseskan koperasi merah putih. Tidak hanya Menteri, Gubernur, Bupati yang menjadi bagian dari satgas percepatan pembentukan koperasi berlomba-lomba untuk menekan desa untuk meralisasikannya.

"Saya pertegas, saya mau koperasi merah putih di 240 desa dan 37 kelurahan se-Kabupaten Langkat selesai pada bulan Juni 2025," ujar Syah Afandin dengan tegas di hadapan para pejabat yang hadir. "Setiap minggu dan setiap bulan saya akan cek langsung. Kalau ada yang tidak bergerak, saya akan berikan peringatan tegas," tandasnya(diskominfo@langkatkab.go.id 2025).

Diatas adalah salah satu penyampaian bupati di Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk memndesak agar koperasi segera dibentuk dan selesai pada bulan Juni. Semakin tegas tekanan dari pemerintah pusat, memberikan tekanan yang semakin berat bagi desa. Selain memberikan tekanan untuk segera membentuk, pemerintah juga mengharuskan koperasi merah putih untuk berhasil,

Desa adalah objek yang tersakiti

Meskipun yang dirugikan tidak mengalami luka yang terlihat, kekerasan tidak langsung yang memiliki karakter psikologis ini pada akhirnya membatasi tindakan orang(Galtung 1969). Sehingga, menurut pandangan ini, pembohongan adalah bentuk tindak kekerasan. Membatasi tindakan yang

⁷ Disebutkan bahwa satu Koperasi Desa Merah Putih harus memiliki anggota minimal 500 orang. Namun, bagi desa dengan jumlah penduduk kurang dari 500 orang, pendirian koperasi dapat dilakukan secara gabungan antar-desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat desa, termasuk di wilayah dengan populasi kecil, tetap dapat merasakan manfaat dari kehadiran koperasi. Tujuh unit bisnis yang diwajibkan ada dalam ekosistem pembentukan Koperasi Merah Putih adalah kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik...lihat (Nefi 2025a)

dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, pembatasan partisipasi dalam proses formulasi program pembentukan koperasi merah putih.

Tidak dilibatkannya Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam proses perumusan program Koperasi Merah Putih dapat dilihat sebagai bentuk berpusatnya sumberdaya (dalam bentuk kekuasaan) secara terpusat. Dalam mekanisme kekerasan struktural, tidak dilibatkannya masyarakat dan pemerintah desa memiliki arti menghalangi aktualisasi mereka terhadap realita untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan di desanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Galtung, bahwa kekerasan struktural adalah segala bentuk tindakan yang menghalangi potensi realisasi actual manusia (Galtung 1969),

Tidak dilibatkannya masyarakat dan pemerintah Desa dalam proses pembuatan kebijakan ini terlihat dari banyaknya kebingungan dan pertanyaan kepala desa (Yunus 2025) terutama terkait teknis lapangan dalam sosialisasi pembentukan koperasi merah putih (Purbaya 2025; Yunus 2025). Bahkan, meskipun pemerintah telah mengklaim bahwa telah dilakukan sosialisasi hampir serentak di seluruh Indonesia⁸, tidak semua warga tahu tentang program tersebut (BBC 2025) yang membuktikan bahwa program yang mengatasnamakan rakyat ini tidak menjadikan kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai basis program.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Konawe Selatan Zulfiana Suganda menuturkan, pertanggungjawaban koperasi menjadi titik penting. Utamanya, jika ada yang bermasalah dan modal tidak bisa kembali. "Kalau misalnya koperasi bisnisnya simpan-pinjam, karena tidak semua desa sama potensinya, lalu macet, bagaimana? Apa konsekuensi hukumnya? (Yunus 2025). Banyak pertanyaan yang diutarakan oleh perangkat desa saat sosialisasi percepatan pembentukan koperasi merah putih yang tidak mampu dijawab bahkan oleh Menteri terkait, terutama berkaitan dengan bangunan yang akan digunakan jika tidak ada bangunan milik pemerintah, potensi tidak mampu membayar pinjaman dari Himbara, gaji pengurus koperasi, konsekuensi hukum dst.

Keresahan kepala desa bukan tanpa alasan, karena akhirnya meskipun pemerintah berjanji dan menarasikan koperasi merah putih dengan positif, berjalan atau tidaknya program ini akan menjadi tugas yang harus dipikul oleh desa. Desa yang awalnya tidak perlu berhutang harus melakukannya agar koperasi tersebut berjalan. Sebagai struktur pemerintahan terendah, desa mengalami banyak tekanan dan tanggung jawab untuk mensukseskan program pemerintah, karena hirarki pemerintah di atasnya juga memberikan tekanan. Sementara desa terus sibuk mensukseskan program pemerintah, desa tidak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Pada akhirnya, desa yang dijanjikan oleh pemerintah untuk lebih sejahtera, hanya akan menjadi penggembira bagi program yang telah dibuat oleh pemerintah, tanpa partisipasi dan didengarkan kebutuhannya.

Pemusatan kekuasaan, perampasan kedaulatan Desa

Meskipun dalam kekerasan struktural orang tidak secara langsung menyakiti orang lain melalui struktur. Kekerasan yang terbentuk karena struktur melahirkan kekuasaan yang timpang dan memiliki konsekuensi akses kesempatan yang tidak sama (Galtung 1969). Dengan kata lain, ketidakadilan sosial *social injustice* adalah nama lain dari kekerasan struktural, dimana sumberdaya hanya dinikmati dan disalurkan oleh kelompok dominan dan tidak semua orang memiliki akses terhadap sumberdaya tersebut.

⁸ Dari jumlah total 83.762 Desa/Kelurahan diseluruh Indonesia, sebanyak 83.685 telah tersosialisasi program koperasi Desa/Kelurahan Merah putih. Lihat (Putih 2025c)

Ketidakadilan sosial yang dimaksud disini adalah, dalam distribusi hak untuk terlibat pada proses formulasi program. Seperti yang telah dijelaskan diatas, masyarakat dan pemerintah tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan yang memiliki makna kekuasaan yang timpang yaitu dominasi pemerintahan pusat. Tidak sesuai dengan cita-cita koperasi yang menentang hirarkis dan dominasi, dengan menghadirkan tata kelola yang partisipatif dan skema pengawasan berbasis komunitas.

Sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta, bahwa koperasi adalah alat untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Berbanding terbalik dengan koperasi merah putih yang merupakan regulasi *top down* yang dibuat tanpa pertimbangan kebutuhan masyarakat desa⁹. Pemerintah pusat yang terlalu ikut campur dalam pemerintahan desa telah merusak otonomi (Media 2025) dan membuatnya bergantung pada pusat. Keberadaan koperasi merah putih juga menimbulkan pertanyaan besar dengan keberadaan BUMDes yang telah lebih dulu ada. Banyak kekhawatiran bahwa koperasi merah putih ini nantinya akan mematikan BUMDes yang sudah ada (Mediatama 2025).

kekerasan struktur yang lahir secara sengaja atau tidak disengaja?

Jika memaknai kekerasan hanya berfokus pada suatu hal disengaja *intended* maka kekerasan struktural akan sulit terlihat, kekerasan yang terbentuk melalui struktur seringkali tampak tidak memiliki objek yang jelas (Galtung 1969). Bukan berarti tidak ada kekerasan didalamnya, kekerasan struktural yang terjadi pada proses percepatan pembentukan koperasi merah putih memang tidak menimbulkan luka secara fisik. Namun, dampak dari tidak dilibatkannya masyarakat dan pemerintah desa memberikan konsekuensi yang menyakitkan desa, meskipun tidak mudah untuk disadari.

Konsekuensi kerugian tersebut diantaranya desa harus mengorbankan kepentingan dan prioritas kebutuhannya dengan mensukseskan pembentukan koperasi merah putih. Meskipun, ada kemungkinan tidak semua desa membutuhkannya. Seperti yang Menteri Pangan Zulkifli Hasan nyatakan bahwa modal koperasi merah putih bukanlah dalam bentuk hibah, melainkan pinjaman yang nantinya harus dibayar. Desa untuk membentuk dan meminjam modal sebanyak 3 milyar yang nantinya akan disalurkan melalui kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian, wajib untuk mengembalikan pinjaman tersebut selama jangka waktu enam tahun (Tempo 2025).

Melalui mekanisme tersebut negara memaksa desa untuk segera membentuk koperasi merah putih tanpa kesadaran masyarakat dan desa. Mengharuskan desa untuk melakukan pinjaman, mengelola koperasi untuk memperoleh keuntungan dan mengembalikan pinjaman tersebut. mekanisme ini diberlakukan sama bagi semua desa. Dengan penyeragaman baik nama dan juga cara bekerjanya, sama artinya koperasi merah putih menghilangkan kekhasan desa.

Dengan kata lain, pemerintah membuktikan bahwa program ini memang tidak memiliki tujuan untuk desa, mengapa demikian? Akan sulit mengatakan bahwa dari 80,000 an desa yang ada di Indonesia memiliki latar belakang dan kebutuhan (Nefi 2025b) yang sama¹⁰. Memukul rata mekanisme berjalannya koperasi merah putih ini adalah bentuk pemusatan kekuasaan terpusat secara halus. Pemusatan kekuasaan secara terpusat adalah bentuk pengingkaran atas hak partisipasi desa untuk mengelola dirinya sendiri yang tidak lain merupakan salah satu ciri khas kekerasan yang terbentuk melalui struktur.

⁹ Jika berdasarkan laporan dari pemerintah terdapat sekitar 83.762

¹⁰ Sadar bahwa kementerian koperasi tidak memiliki data yang presisi terkait dengan kebutuhan desa. Wakil menteri meminta bersama-sama dengan DPR untuk membuat roadmap operasional koperasi merah putih (Nefi 2025b). Dengan peluncuran 80.000 an koperasi merah putih secara serentak di Indonesia, memberikan resiko yang tidak ringan, terlepas dari belum matangnya rencana tersebut pemerintah tetap menjalankannya. daripada menjalankan program secara serentak, pembentukan secara bertahap menjadikan salah satu opsi yang perlu untuk dipertimbangkan, lihat (Risza 2025).

Kekerasan laten yang melumpuhkan kemandirian desa

Kekerasan yang terbentuk melalui struktur bersifat laten¹¹, yang biasanya tenang, tidak terlihat dan statis. Karena tipologinya yang tenang dan tidak terlihat di permukaan. Kekerasan struktural seringkali sebagai sebuah hal yang alami dan tidak dipermasalahkan (Galtung 1969). Untuk kasus koperasi merah, hak masyarakat dan pemerintah untuk menjadi bagian dalam proses pembuatan kebijakan tersebut tidak terealisasikan. Masyarakat dan Pemerintah desa menerima kebijakan tersebut dalam bentuk yang sudah jadi dan merupakan perintah yang mau atau tidak mau harus dilaksanakan.

Kekerasan struktural memberikan jarak atau menjauhkan potensi yang dimiliki orang dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Dengan tidak mengikut sertakan pemerintah dan masyarakat desa dalam proses pembuatan program, memiliki arti bahwa pemerintah pusat telah bertindak menghalangi potensi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengutarakan kebutuhan dan kepentingan desa yang merupakan haknya. Hal ini menjadi penting karena akhirnya program ini akan diberlakukan di desa tempat dia tinggal dan juga menggunakan dana yang dimiliki oleh desa.

Banyak dari warga desa yang tidak mengetahui program tersebut. penelitian yang dilakukan oleh celios menyatakan 65% perangkat desa khawatir dengan program tersebut (Mediatama 2025). Sayangnya, justru ketakutan dan kebingungan perangkat desa tidak terlalu dianggap serius oleh pemerintah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan percaya diri mengatakan hampir semua desa setuju dengan percepatan Koperasi Merah Putih, dan hanya satu dua desa saja yang tidak setuju (Diskusi Tematik “Problematika Koperasi Desa Merah Putih 2025).

KESIMPULAN

Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktur karena tanpa melibatkan masyarakat dan pemerintah desa pemerintah memberikan kewajiban bagi desa untuk menjalankan dan mensukseskannya dengan menggunakan struktur untuk melakukan desakan. Setidaknya ada enam hal karakteristik kekerasan struktural dari Galtung sebagai landasan analisa oleh tulisan ini. Pertama, hal yang membedakan antara kekerasan fisik dan psikologis yang ditunjukkan dengan upaya pemerintah dengan pemberitaan, pernyataan dan juga harapan-harapan dengan narasi positif melalui sosialisasi, artikel maupun diskusi-diskusi publik. Kedua, upaya untuk mempengaruhi dengan menggunakan pendekatan positif dan negatif. Ketiga, pendekatan objek, tentang ada atau tidaknya objek yang disakiti. Objek yang tersakiti disini adalah desa yang akhirnya bertugas untuk menjalankan dan mensukseskan program pemerintah, dengan konsekuensi harus menjadikannya sebagai prioritas desa diatas kepentingan yang lainnya. Keempat, ada atau tidaknya aktor yang bertindak, meskipun pemerintah pusat tidak secara terang-terangan menunjukkan dominasinya atas program koperasi merah putih. Keputusan pemerintah yang secara tiba-tiba membuat program pada bulan Maret, mengharuskan desa untuk segera membentuk koperasi desa dengan tujuh lembaga bisnis didalamnya, dan harus selesai pada bulan Juni/ Juli menunjukkan sikap yang melambangkan kendali kuasa yang kuat atas desa. Kelima, apakah kekerasan dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja? Pemerintah dengan sengaja tidak melibatkan desa, yang memiliki makna pengingkaran atas hak desa dalam hal menyuarakan kepentingan dan kebutuhan sebagai objek program koperasi merah putih. Keenam, kekerasan yang termanifestasi dan laten. Sesuai dengan tipikal kekerasan struktural yang bersifat laten dan tidak terlihat di permukaan, kekerasan ini berpotensi menjadi motor ketidakpuasan yang memungkinkan justru melemahkan dan menggagalkan program.

¹¹ Ada namun belum aktif, atau terbentuk bisa dikatakan masih dalam bentuk potensi-potensi. Lihat (Oxford 2008)

Apa yang pemerintah pusat lakukan dengan seringkali menyatakan koperasi merah putih adalah untuk rakyat kecil tanpa melibatkan pemerintah dan rakyat desa dalam proses pembuatan kebijakan tersebut adalah bentuk tindak kekerasan yang dilakukan melalui struktur. Karena dengan tidak melibatkan mereka memiliki arti bahwa pemerintah pusat melakukan program kebijakan tanpa pengetahuan akan kebutuhan dan kepentingan desa.

REFERENSI

- Amaliyah, Suci. 2025. "Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Rugikan Ekonomi dan Gagal Serap Tenaga Kerja." *NU Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/koperasi-desah-merah-putih-berpotensi-rugikan-ekonomi-dan-gagal-serap-tenaga-kerja-MxEmf> (July 30, 2025).
- Anggia, Leksa Putri. 2025. "Zulhas: Kalau Koperasi Desa Merah Putih Gagal, Tidak akan Ada Koperasi Lagi | tempo.co." *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/zulhas-kalau-koperasi-desah-merah-putih-gagal-tidak-akan-ada-koperasi-lagi-1805579> (July 31, 2025).
- Arzewiniga, Febianriza, and Zulkarnain. 2025. "TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH." *Jurnal Manajemen dan Inovasi* 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/2188> (July 23, 2025).
- Askar, Media Wahyudi, - Galau D Muhammad, Bara Muhammad Setiadi, Aulia Lianasari, Jaya Darmawan, and Bakhrul Fikri. 2025. *Research on Red and White Village Cooperatives*. <https://celios.co.id/red-and-white-cooperatives-or-red-and-white-squeeze/> (July 24, 2025).
- Ayuningrum, Retno. 2025. "Koperasi Merah Putih Untung Rp 1 M Bikin Ragu, Budi Arie Bilang Begini." *detikfinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7933138/koperasi-merah-putih-untung-rp-1-m-bikin-ragu-budi-arie-bilang-begini> (July 31, 2025).
- BBC. 2025. "Koperasi Merah Putih: Bisakah potensi korupsi dan kebocoran anggaran yang diperkirakan triliunan rupiah dicegah?" *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2d06jk3xjko> (July 29, 2025).
- bpk. 2025. "Inpres No. 9 Tahun 2025." *Database Peraturan | JDIH BPK*. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/316750/inpres-no-9-tahun-2025> (July 22, 2025).
- Dirgantara, Adhyasta, and Ardito Ramadhan. 2025. "Nurdin Halid Wanti-Wanti Koperasi Merah Putih Jangan Sampai Gagal Seperti KUD." <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/22/21060941/nurdin-halid-wanti-wanti-koperasi-merah-putih-jangan-sampai-gagal-seperti> (July 30, 2025).
- diskominfo@langkatkab.go.id. 2025. "Syah Afandin Instruksikan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Akan Berikan Sanksi Jika Tidak Ada Progres - Pemerintah Kabupaten Langkat." <https://www.langkatkab.go.id/berita/5222/syah-afandin-instruksikan-pembentukan-koperasi-merah-putih> (July 31, 2025).
- Diskusi Tematik "Problematika Koperasi Desa Merah Putih"*. 2025. Ombudsman. https://www.youtube.com/watch?v=nbEs_3USxVI (July 30, 2025).
- Farid, Ahmad Salman. 2025. "Wacana Kritis Media Online Terhadap Koperasi Merah Putih Sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa." *JURNAL SYIAR-SYIAR* 5(1): 57-75. doi:10.36490/syiar.v5i1.1728.

- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6(3): 167–91.
- Gernot, Köhler, and Norman Alcock. 1976. "An Empirical Table of Structural Violence on JSTOR." https://www.jstor.org/stable/422498?searchText=An+Empirical+Table+of+Structural+Violence&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAn%2BEmpirical%2BTable%2Bof%2BStructural%2BViolence%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A099c4dca829b495567b4e6fb7d1b2713&seq=1 (July 21, 2025).
- Haris, M. Nafiul. 2025. "Koperasi Merah Putih: Ketika Desa Menjadi Startup." *detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-8031924/koperasi-merah-putih-ketika-desa-menjadi-startup> (July 30, 2025).
- Irfani, Faisal. 2025. "Koperasi Merah Putih: Bisakah potensi korupsi dan kebocoran anggaran yang diperkirakan triliunan rupiah dicegah?" *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2d06jk3xjko> (July 30, 2025).
- Jelita, Nantika. 2025. "Kopdes Merah Putih Dikhawatirkan Jadi Bancakan Makelar Proyek." <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoo7Z-kopdes-merah-putih-dikhawatirkan-jadi-bancakan-makelar-proyek> (July 30, 2025).
- Kathleen, Ho. 2007. "Structural Violence as a Human Rights Violation." *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/26605652_Structural_Violence_as_a_Human_Rights_Violation (July 21, 2025).
- Kementerian Koperasi Republik Indonesia. 2025. "Tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih." <https://kopdesmerahputih.kop.id/> (July 23, 2025).
- Kusumasari, Lita. 2025. "Synergy between Village-Owned Enterprises and Merah Putih Village Cooperatives: The Road to Economic Independence." *Equity: Jurnal Akuntansi* 5(2). doi:10.46821/equity.v5i2.648.
- Media, Kompas Cyber. 2025. "Koperasi Merah Putih: Membangun dari Komunitas, Bukan dari Modal." *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/07/20/060000426/koperasi-merah-putih--membangun-dari-komunitas-bukan-dari-modal> (July 29, 2025).
- Mediana, Caecilia. 2025. "Studi Celios: Perangkat Desa Menilai Koperasi Merah Putih Belum Mendesak." *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/studi-celios-perangkat-desa-nilai-koperasi-merah-putih-belum-mendesak> (July 30, 2025).
- Mediatama, Grahanusa. 2025. "Celios: Koperasi Merah Putih Berisiko Rugikan Negara dan Gagal Serap Tenaga Kerja." *kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/celios-koperasi-merah-putih-berisiko-rugikan-negara-dan-gagal-serap-tenaga-kerja> (July 23, 2025).
- Musadad, Anwar, Hari Sulistiyo, Nanu Hasanuh, Sri Suartini, Gusganda Suriamanda, Irvan Yoga Pardistya, Salim Siregar, and Novy Trianthy Noegraha. 2025. "Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Digital: Inisiasi Koperasi Merah Putih Di Cipayung Asri, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Isei* 3(1): 1–7. doi:10.46750/abdimasisei.v3i1.341.
- Nasional, Badan Pangan. 2025. "Badan Pangan Nasional - Wujudkan Koperasi Merah Putih Sebagai Katalis Ekonomi Desa, Badan Pangan Nasional Dukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Masyarakat - Blog." <https://badanpangan.go.id/blog/post/wujudkan-koperasi-merah->

- putih-sebagai-katalis-ekonomi-desa-badan-pangan-nasional-dukung-pemenuhan-kebutuhan-pangan-pokok-strategis-masyarakat (July 29, 2025).
- Nefi, Alfitria. 2025a. “Koperasi Desa Merah Putih Wajib Punya 7 Unit Bisnis | tempo.co.” *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/koperasi-desa-merah-putih-wajib-punya-7-unit-bisnis-1231242> (July 31, 2025).
- Nefi, Alfitria. 2025b. “Pemerintah Khawatir Koperasi Desa Merah Putih Gagal Atasi Kemiskinan | tempo.co.” *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-khawatir-koperasi-desa-merah-putih-gagal-atasi-kemiskinan-1945463> (July 30, 2025).
- Nuraisyah, Syifa. 2025. “Koperasi Merah Putih Bukti Nyata Ekonomi Inklusif dari Desa untuk Indonesia.” *Presiden RI*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/koperasi-merah-putih-bukti-nyata-ekonomi-inklusif-dari-desa-untuk-indonesia/> (July 30, 2025).
- Oxford. 2008. *Oxford Learners Pocket Dictionary*. Fourth. Oxford University Press.
- Para Kades Bakal Demo Tolak Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih: Program Prabowo Membebani Desa!* 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=gLbuFv8nsP4> (July 28, 2025).
- Parsons, Kenneth A. 2007. “Structural Violence and Power.” *Peace Review* 19(2): 173–81. doi:10.1080/10402650701353612.
- Pratama, Galih. 2025. “Matematika ‘Ngawur’ Koperasi Merah Putih, Modal Rp400 T, Kok Untungnya Rp2.000 T, Bisnis Apa?” *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/?p=333784> (July 30, 2025).
- Purbaya, Angling Adhitya. 2025. “Menkop Yakinkan Kades yang Resah soal Pengelolaan Koperasi Merah Putih.” *detikjateng*. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7902741/menkop-yakinkan-kades-yang-resah-soal-pengelolaan-koperasi-merah-putih> (July 28, 2025).
- Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah. 2025a. “Jawa Barat Siap Membumikan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Untuk Memperkuat Ekonomi Desa.” <https://kopdesmerahputih.kop.id/> (July 23, 2025).
- Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah. 2025b. “Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes/ Kel Merah Putih Murah.” <https://kopdesmerahputih.kop.id/> (July 24, 2025).
- Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah. 2025c. “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.” <https://kopdesmerahputih.kop.id/> (July 29, 2025).
- Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah. 2025d. “Menkop Budi Arie: Stop Ketakutan, Kecurigaan Dan Keragu-Raguan Demi Keberhasilan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.” <https://kopdesmerahputih.kop.id/> (July 24, 2025).
- Ragandang, Primitivo III Cabanes. 2024. “In Honor of Johan Galtung, the Father of Peace Studies.” *Peace Review* 36(3): 491–98. doi:10.1080/10402659.2024.2360472.
- Risza, Handi. 2025. “Koperasi Merah Putih: Menjaga Asa Menggerakkan Perekonomian Masyarakat.” *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250729153403-14-653255/koperasi-merah-putih-menjaga-asa-menggerakkan-perekonomian-masyarakat> (July 30, 2025).
- Saleh, Muhamad. 2025. “Koperasi Merah Putih berisiko tinggi jadi ladang korupsi baru.” *The Conversation*. <http://theconversation.com/koperasi-merah-putih-berisiko-tinggi-jadi-ladang-korupsi-baru-261401> (July 30, 2025).

- Setiawan, Iwan. 2025. "Kopdes Merah Putih Bukti Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat." <https://news.detik.com/kolom/d-8024812/kopdes-merah-putih-bukti-keberpihakan-terhadap-ekonomi-rakyat> (July 30, 2025).
- Subakti, Try, and Siti Partiah. 2025. "PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT." *Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1): 1–13.
- Tempo. 2025. "Prosedur Koperasi Desa Merah Putih Memperoleh Modal Awal Rp 3 Miliar | tempo.co." *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/prosedur-koperasi-desah-merah-putih-memperoleh-modal-awal-rp-3-miliar-1483948> (July 29, 2025).
- Winter, Yves. 2012. "Violence and Visibility." *New Political Science* 34(2): 195–202. doi:10.1080/07393148.2012.676397.
- Yaputra, Hendrik. 2025. "Prabowo: Ada Profesor Sebut Koperasi Merah Putih Tak Berguna | tempo.co." *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-ada-profesor-sebut-koperasi-merah-putih-tak-berguna-1234749> (July 30, 2025).
- Yunus, Saiful Rijal. 2025. "Tanya Kades di Sultra yang Belum Terjawab pada Sosialisasi Koperasi Merah Putih." *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/tanya-kades-di-sultra-yang-belum-terjawab-pada-sosialisasi-koperasi-merah-putih> (July 28, 2025).